

**PERAMALAN ASUMSI DASAR**

**EKONOMI MAKRO**

**DALAM RAPBN TAHUN 2018**

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DPR RI

TAHUN 2017

## Daftar Isi

---

Daftar Isi .....	1
Daftar Tabel .....	2
Daftar Gambar .....	3
Daftar Singkatan .....	5
Pendahuluan .....	8
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi.....	12
Prediksi Inflasi.....	20
Prediksi Nilai Tukar.....	33
Prediksi Nilai Tukar Rupiah .....	33
Bunga SPN 3 Bulan.....	43
Prediksi Suku Bunga SPN 3 Bulan.....	43
Prediksi Harga Minyak Mentah Indonesia.....	51
Prediksi Lifting Minyak Bumi.....	59
Prediksi Lifting Gas Bumi.....	69
Tim Penyusun .....	77

## Daftar Tabel

---

Tabel 1 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Beberapa Lembaga Keuangan Internasional.....	17
Tabel 2 Indeks Harga Komoditas Dunia Proyeksinya Tahun 2018 .....	27
Tabel 3 Impor Nonmigas (c.i.f) menurut Kelompok Barang.....	37

## Daftar Gambar

---

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi 2010-2016 (%) .....	13
Gambar 2 Kontribusi Rata-Rata Terhadap PDB Tahun 2010-2016 Berdasarkan Pengeluaran.....	14
Gambar 3 Kontribusi Rata-Rata Terhadap PDB Tahun 2010-2016 Berdasarkan Lapangan Usaha .....	16
Gambar 4 Perkembangan Inflasi Tahun 2013-2017 (% , YoY) .....	22
Gambar 5 Komponen Perkembangan Inflasi (% , YoY).....	24
Gambar 6 Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Tahun 1990-2017.	34
Gambar 7 Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 1990 – 2016 ...	36
Gambar 8 Perkiraan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Tahun 2017 dan 2018.....	41
Gambar 9 Perkembangan Defisit dan SPN 3 Bulan.....	44
Gambar 10 Perkembangan Anggaran Infrastruktur dan Subsidi	45
Gambar 11 Perkembangan Utang Pemerintah Pusat (Triliun Rupiah).....	46
Gambar 12 Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat (Triliun Rupiah).....	47
Gambar 13 Rasio Pembayaran Utang (persen) .....	48
Gambar 14 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa .....	49
Gambar 15 Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) .....	52
Gambar 16 Perkembangan Harga ICP, Brent, dan WTI 2010 - 2017 .....	56
Gambar 17 Perkembangan ICP Tahun 1987 - 2018.....	57
Gambar 18 Skema Hubungan Lifting Minyak Bumi terhadap Postur APBN .....	60
Gambar 19 Grafik Perkembangan Realisasi Target Lifting Minyak di Indonesia Tahun 2006-2016.....	61
Gambar 20 Permintaan dan Penawaran Minyak Global .....	64
Gambar 21 Prediksi Lifting Minyak 2018.....	67

Gambar 22 Produksi dan Konsumsi Gas Indonesia .....	70
Gambar 23 Neraca Perdagangan Gas Indonesia.....	71
Gambar 24 Kontribusi Gas Terhadap Penerimaan Negara .....	72
Gambar 25 Perkembangan Lifting Gas Tahun 2008 – 2018.....	74

## **Daftar Singkatan**

ADB	:	Asian Development Bank
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
AR	:	Autoregressive
ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BCSA	:	Bilateral Currency Swap Agreement
BI	:	Bank Indonesia
BK DPR RI	:	Badan Keahlian DPR RI
BOE	:	Barrel of Oil Equivalent
BOJ	:	Bank of Japan
BPH	:	Barel per hari
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DBH SDA	:	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
ECB	:	European Central Bank
EOR	:	Enhanced Oil Recovery
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
FDI	:	Foreign Direct Investment

FFR	:	Fed Fund Rate
HBKN	:	Hari Besar Keagamaan Nasional
ICP	:	Indonesian Crude Price
IEA	:	International Energy Agency
IHK	:	Indeks Harga Konsumen
IMF	:	International Monetary Fund
IOR	:	Improved Oil Recovery
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
LPG	:	Liquefied Petroleum Gas
MBOEPD	:	Thousand Barrels of Oil Equivalent Per Day
MMBTU	:	Million British Thermal Unit
MMSCF	:	Million Standard Cubic Feet
OECD	:	Organisation for Economic Co-operation and Development
OPEC	:	Organization Of Petroleum Exporting Countries
PBOC	:	People's Bank of China
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

RAPBNP	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDR	:	Special Drawing Right
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SUN	:	Surat Utang Negara
The Fed	:	The Federal Reserve System
TTL	:	Tarif Tenaga Listrik
UI	:	Universitas Indonesia
UK	:	United Kingdom
US	:	United States
USD	:	United State Dollar
WTI	:	West Texas Intermediate





# Pendahuluan

## **Pendahuluan**

Sampai triwulan I tahun 2017, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia terus membaik. Ditengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja perekonomian Indonesia masih cukup stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya perbaikan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi dari beberapa lembaga pemeringkat utang internasional, seperti Moody's yang memberikan peringkat BBB, Fitch Ratings dengan peringkat BBB-, Japan Credit Rating Agency dengan peringkat BBB-, Rating & Investment dengan peringkat BBB- serta S&P Global dengan peringkat utang jangka panjang BBB- dan peringkat utang jangka pendek AAA. Alasan kenaikan peringkat utang dari lembaga internasional ini dikarenakan berkurangnya resiko fiskal seiring kebijakan anggaran pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan. Selain itu, pemerintah juga dinilai telah merumuskan kebijakan yang efektif dalam mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan

pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Namun, dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, peringkat utang Indonesia masih di bawah kedua negara tersebut, sehingga Indonesia harus lebih giat lagi dalam menjaga kestabilan makroekonominya.

Dari sisi penerimaan negara, perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal saat ini lebih terkendali. Bank sentral juga turut andil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonomi dan keuangan kepada stabilitas makro ekonomi. Namun, tantangan dari eksternal seperti, dinamika ekonomi negara maju, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, perkembangan ekonomi di Tiongkok, faktor geo-politik serta keamanan regional dan dunia masih harus diwaspadai dan diantisipasi pengaruhnya terhadap volatilitas nilai tukar Rupiah.

Penguatan fungsi alokasi terus dilakukan pemerintah dengan memperbaiki alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas, mendukung program prioritas, memperkuat modal dasar yaitu sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap kesesuaian antara anggaran dan program prioritas harus

senantiasa ditingkatkan sehingga tujuan yang telah dicantumkan dalam nawacita dapat tercapai.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran telah berhasil diturunkan, namun masih terdapat lebih dari 27 juta yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kesenjangan baik pendapatan maupun antarwilayah serta berbagai permasalahan sosial lain masih menjadi tantangan pemerintah untuk diselesaikan.

Selain keselarasan antara visi dan anggaran, pemerintah juga seyogyanya melakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan antarsektor sehingga tidak lagi ditemukan peraturan yang saling tumpang tindih atau malah menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Perbaikan kondisi makroekonomi saat ini harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan sehingga mampu menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Indonesia, sehingga investasi dapat menjadi motor tambahan penggerak pertumbuhan ekonomi selain konsumsi agregat yang selama ini masih menjadi primadona.

Berdasarkan penjabaran alasan di atas, maka Tim Penyusun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dari Pusat Kajian

Anggaran Badan Keahlian DPR RI melakukan analisis terhadap Prediksi Indikator Ekonomi tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

INDIKATOR MAKRO	APBN 2017	2018*	PREDIKSI 2018
Pertumbuhan Ekonomi	5,3 %	5,4 % - 6,1%	5,1% - 5,7%
Inflasi	4% ±1 %	3,5% ±1 %	3,5% - 4%
Nilai Tukar	Rp 13.000 / USD	Rp 13.500 - Rp 13.800/USD	Rp13.300 - 14.100/USD
SPN 3 Bulan	5,5 %	4,8% - 5,6%	5,1% - 5,6%
Harga Minyak	50 USD / barel	45 - 60 USD/Barel	43.3 - 57,7 USD/Barel
Lifting Minyak	830 Ribu BPH	771 - 815 Ribu BPH	713 -787 Ribu BPH
Lifting Gas	1,15 juta bph	1.194 - 1.235 ribu bph	1.130 - 1.210 ribu bph

\* Pagu indikatif dalam Perkembangan Ekonomi dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2018